

Defisit Anggaran dan Implikasinya terhadap Perkembangan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Kabupaten Tebo

Astuti Prihatiningsih, M. Rachmad R, Syamsuddin HM

Program Magister Ilmu Ekonomi Fak. Ekonomi Universitas Jambi

Abstract. This study aims to 1) To analyze the determinants that will influence the budget deficit in Tebo district budget. 2) To analyze whether there is a correlation between the budget deficit with Tebo regency economic development. 3) To analyze whether there is a correlation between the financial performance of the budget deficit with Tebo regency. The method used in this study is a secondary data analysis methods. Based on the results of testing the model regression shows the value of the F-count is high at 12 130. With an alpha of 0.05 $df_1 = 3$, $DF_2 = 4$ obtained F-table at 6:59. so the $F\text{-count} > F\text{-table}$. this indicates that the independent variables are jointly significant effect on the dependent variable, so that personnel expenditure, capital expenditure and spending on goods and services during the period 2004-2011 are jointly significant effect on the budget deficit in Tebo regency. Each there is an increase of 1 billion budget deficit, it will cause a reduction in personnel expenses amounted to 4.52 billion Tebo regency. Any increased capital expenditure budget of 1 billion budget deficit will increase by 5.01 billion. Any increased budget allocation of goods and services amounted to 1 billion, the budget deficit will increase by 8.17 billion. the greatest influence on the budget deficit from the budget allocation of goods and services. The results of the analysis of the budget deficit relationship with economic development in Tebo regency during 2006-2010 showed that the budget deficit by using a simple Pearson correlation test has a relationship of -0.07986. These results illustrate that the budget deficit has a negative relationship with economic development. The results of the analysis of the relationship with the budget deficit in the region's financial performance during the period 2006-2010 Tebo regency showed that the budget deficit with the financial performance using tools Pearson correlation test has a relationship of -0.04703. The results illustrate that the budget deficit has a negative relationship with financial performance.

Keywords: budget deficit, budget allocation, capital expenditure budget

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 1998), diuraikan bahwa pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan pendapatan perkapita, karena kenaikan pendapatan perkapita merupakan cerminan dari timbulnya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional serta memberikan arah bagi pelaksanaan

pembangunan agar berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan sasarannya adalah dengan melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan dari desentralisasi fiskal adalah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih demokratis. Dalam prakteknya, desentralisasi diwujudkan dengan melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan dibawahnya untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan pajak yang

menjadi kewenangan daerah, pembentukan Dewan yang dipilih rakyat serta pemilihan kepala daerah. Selain itu, pelaksanaan desentralisasi juga diwujudkan melalui pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Otonomi daerah ini selaras dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang merupakan penyempurnaan atas UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 25 Tahun 1999). Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat.

Kebijakan desentralisasi fiskal memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Pada sektor penerimaan pemerintah daerah berusaha memperoleh penerimaan dari potensi daerah yang dapat menghasilkan penerimaan terutama dari pajak dan retribusi. Pemungutan pajak dan retribusi pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian yang dilihat dari PDRB per kapita. Penerimaan dari bagi hasil dan dana alokasi umum untuk pemerintah daerah didasarkan pada kemampuan perekonomian daerah serta jumlah penduduk.

Menurut Darumurti dan Rauta (2000), implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Bahl (2000) mengatakan, dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip

money should follow function merupakan salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Sebagai salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro untuk mencapai sasaran pembangunan, kebijakan fiskal yang dituangkan dalam bentuk APBN/APBD mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan fungsi stabilisasi ekonomi makro dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Samuelson (1997), mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai salah satu proses pemebentukan perpajakan dan pengeluaran publik. Proses tersebut merupakan upaya menekan fluktuasi siklus ekonomi, dan ikut berperan menjaga ekonomi yang tumbuh dengan penggunaan tenaga kerja penuh dimana tidak terjadi laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah.

Permasalahan dalam bidang fiskal tidak hanya mencakup kompleksitas memformulasikan besaran penerimaan dan mengatur kombinasi alokasi pengeluaran negara yang optimal, melainkan lebih menonjol adalah kearah upaya menutup kekurangan pembiayaan (*financing gap*) berkaitan dengan pembayaran utang. Sehingga tantangan kebijakan fiskal ke depan tidak hanya dalam penentuan strategi pembiayaan yang tepat tetapi juga pada masalah pengendalian defisit anggaran (Departemen Keuangan, 2004).

Hingga saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan di tiap kabupaten dan kota di Indonesia. Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat dalam mengatur rumah tangga daerah. Simanjuntak (2001), hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang

daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 3, bahwa Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 3 Ayat (2).

Melalui penerapan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 Ayat (2) di mana Pemerintahan daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan pada Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun pemerintah daerah sendiri sebagai implementasi dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap kebijakan fiskal berupa anggaran pendapatan dan belanja melalui instrumen APBD. Berbagai kebijakan tersebut membawa dampak terhadap perubahan pada besarnya defisit anggaran disetiap tahunnya.

Namun dalam pengambilan kebijakan fiskalnya pemerintah daerah dipengaruhi oleh kondisi dimana pada saat ini APBD bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi tapi juga menyangkut

keputusan politik. Kepala daerah selaku pejabat publik tentu akan merealisasikan janji politiknya dengan berbagai program yang akan mendukung pencitraan dirinya. Dengan membuat program baru untuk meraih simpati masyarakat. DPRD dengan hak budgetnya memiliki peranan penting dalam menentukan alokasi dana program tertentu selain yang diajukan pemerintah daerah. Namun pada prakteknya hak budget tersebut sering digunakan untuk kepentingan politik praktis dengan mengatas namakan aspirasi masyarakat yang diwakilinya sehingga hal ini akan menambah beban anggaran belanja.

Struktur belanja Pemerintah Kabupaten Tebo selama lima tahun terakhir (tahun 2006-2010) menunjukkan jumlah yang berfluktuasi demikian halnya dengan jumlah anggaran pendapatannya dan perkembangan ekonominya jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Selain itu, selama periode tersebut anggaran pada APBD Kabupaten Tebo selalu mengalami defisit.

Tabel 1. APBD, Defisit Anggaran dalam APBD dan PDRB Kabupaten Tebo Selama Periode 2006-2010 (Rp 000.000,-)

Tahun	Anggaran Pendapatan	Anggaran Belanja	Defisit Anggaran	PDRB
2006	334.886	379.672	(45.231)	64.246
2007	377.232	427.901	(50.689)	43.279
2008	474.328	555.001	(80.672)	46.843
2009	478.989	505.588	(26.598)	40.941
2010	567.205	576.430	(9.225)	52.628

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tebo

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) determinan apa saja yang mempengaruhi defisit anggaran pada APBD Kabupaten Tebo; (2) korelasi antara defisit anggaran dengan perkembangan ekonomi pada APBD Kabupaten Tebo; (3) korelasi antara defisit anggaran dengan kinerja keuangan daerah Kabupaten Tebo.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: (1) Bagi kalangan akademisi, sebagai referensi bagi

peneliti selanjutnya yang berminat menganalisis mengenai penelitian yang berhubungan dengan defisit anggaran, perkembangan ekonomi, dan kinerja keuangan; (2) Bagi kalangan praktisi, diharapkan dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan, khususnya untuk mengatasi defisit anggaran dan peningkatan kinerja keuangan dan perkembangan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan adalah data periode Tahun 2006-2010 yang mencakup:

1. APBD Kabupaten Tebo
2. Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Tebo
3. Realisasi anggaran Kabupaten Tebo.
4. Tebo Dalam Angka.

Data bersumber dan diperoleh dari:

1. Kantor BPS Kabupaten Tebo
2. Kantor DPPKAD Kabupaten Tebo

Metode Analisis Data

Analisis Pertama

Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda. Untuk menganalisis pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal terhadap defisit anggaran. Persamaan regresi berganda adalah:

$$Y = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2 + a_3 X_3 + e$$

Di mana:

Y = defisit anggaran

X₁ = belanja pegawai

X₂ = belanja barang dan jasa

X₃ = belanja modal

e = error term

Analisis Ke Dua dan Ketiga

Untuk menghitung besaran nilai hubungan atau korelasi perkembangan ekonomi dengan defisit anggaran Kabupaten Tebo selama periode 2006-2010 dengan menggunakan metode korelasi sederhana Pearson (*Product Moment Coeficient of Correlation*). Begitu pula dengan metode yang digunakan dalam menghitung besaran nilai hubungan korelasi berbagai rasio kinerja keuangan

daerah dengan defisit anggaran Kabupaten Tebo selama periode 2006-2010, menggunakan alat uji korelasi sederhana Pearson.

Besarnya koefisien korelasi (r), antara dua buah variabel (y dan x) adalah nol sampai dengan lebih kurang 1. Apabila dua buah variabel (y dan x) mempunyai nilai r = 0 berarti variabel-variabel tersebut tidak ada hubungan. Apabila variabel-variabel itu mempunyai r = lebih kurang 1, maka kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang sempurna.

Tabel 2. Interpretasi Koefisien korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,000	Sangat Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Cukup Kuat
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defisit Anggaran

Defisit anggaran merupakan selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif. Hal ini berarti anggaran pendapatan nilainya lebih kecil dari anggaran belanja. Untuk menganalisis faktor apa saja yang dominan terhadap timbulnya defisit anggaran dapat dilihat sejauhmana pertumbuhan dari setiap komponen pendapatan dan belanja setiap tahunnya.

Besarnya perkembangan defisit anggaran dan pertumbuhannya pada Kabupaten Tebo selama periode tahun 2006-2010 bisa dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Defisit Anggaran Kabupaten Tebo Periode 2006-2010 (Rp 000,-)

Tahun	Defisit	Pertumbuhan	
		Nominal	Persentase
2006	45.231.294	-	-
2007	50.668.752	5.437.458	12,02
2008	80.672.162	30.003.410	59,21
2009	26.598.211	(54.073.951)	(67,02)
2010	9.224.610	(17.373.601)	(65,31)
Rata-rata	42.479.006	(9.001.671)	(15,27)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tebo (data diolah)

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2006-2010 defisit anggaran pada Kabupaten Tebo rata-rata sebesar Rp 42.479.006.000. Mengalami pertumbuhan defisit rata-rata sebesar minus Rp 9.001.671.000 atau sebesar minus 15,27 persen.

Defisit anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 80.672.162.000 dan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 9.224.610.000. Jika dilihat dari pertumbuhannya secara nominal, defisit anggaran mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar minus Rp 54.073.951.000 dan terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp 5.437.458.000

Selama periode tahun 2006-2010 pertumbuhan anggaran pendapatan dan anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Tebo diberikan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Kabupaten Tebo selama tahun 2006-2010 (Rp 000.000,-)

Tahun	Pertumbuhan Anggaran Pendapatan		Pertumbuhan Anggaran Belanja	
	Nominal	(%)	Nominal	(%)
2006	-	-	-	-
2007	42.346	12,69	48.229	12,70
2008	97.096	25,74	86.032	29,70
2009	4.661	0,98	(29.545)	(8,90)
2010	88.216	18,42	28.952	14,01
Rata-rata	58.080	14,44	49.190	11,88

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tebo (data diolah)

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat tingkat pertumbuhan anggaran pendapatan maupun anggaran belanja selama periode 2006-2010. Anggaran pendapatan pada Kabupaten Tebo memiliki rata-rata lebih tinggi bila dibandingkan dengan anggaran belanja. Jika dilihat dari pertumbuhan anggaran pendapatan pada Kabupaten Tebo selama periode 2006-2010 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar Rp 58.080 juta atau sebesar 14,44 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 97.096 juta atau sebesar 25,74 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada

tahun 2009 yakni sebesar Rp 4.661 juta atau sebesar 0,98 persen.

Pertumbuhan anggaran belanja lebih dominan daripada anggaran pendapatan terjadi pada tahun 2006, yaitu sebesar - Rp 29.545 juta. Selama periode 2006-2010 anggaran belanja pada Kabupaten Tebo memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar Rp 49.189 juta. Pertumbuhan anggaran belanja tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 86.032 juta atau sebesar 29,70 persen dan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar - Rp 29.545 juta atau 8,90 persen. Sedangkan anggaran pendapatan lebih dominan terjadi pada tahun 2008 hingga tahun 2010.

Untuk melihat pertumbuhan anggaran belanja tidak langsung (BTL) dan pertumbuhan anggaran belanja langsung (BL) pada Kabupaten Tebo selama periode tahun 2006-2010 dapat dilihat dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5. Pertumbuhan anggaran BTL dan pertumbuhan anggaran BL Kabupaten Tebo periode tahun 2006-2010 (Rp 000.000,-)

Tahun	Pertumbuhan Anggaran BTL		Pertumbuhan Anggaran BL	
	Nominal	%	Nominal	%
2006	-	-	-	-
2007	21.137	17,12	27.092	10,57
2008	39.413	27,26	87.687	30,95
2009	6.419	3,48	(55.832)	(15,05)
2010	59.294	31,14	549	0,17
Rata-rata	31.566	19,75	14.874	6,66

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tebo (diolah)

Rata-rata pertumbuhan anggaran Belanja Tidak Langsung baik secara nominal maupun secara persentase selama periode tahun 2006-2010 lebih tinggi bila dibandingkan rata-rata pertumbuhan anggaran Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 31.566 juta atau 19,75 persen. Sedangkan anggaran Belanja Langsung mengalami pertumbuhan rata-rata secara nominal sebesar Rp 14.874 juta atau 6,66 persen. Belanja tidak langsung mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 59.294 juta atau sebesar 31,14 persen. Pertumbuhan terendah terjadi

pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 6.419 juta atau sebesar 3,48 persen. Belanja langsung selama periode 2006-2010 mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 87.687 juta atau sebesar 30,95 persen. Terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar - Rp 55.832 juta atau sebesar 15,05 persen.

Untuk melihat pertumbuhan komponen anggaran belanja tidak langsung dan komponen belanja apa saja yang lebih dominan dalam menyebabkan terjadinya defisit anggaran pada Kabupaten Tebo selama tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Pertumbuhan Komponen Anggaran BTL Kabupaten Tebo tahun 2006-2010 (Rp 000)

Komponen Belanja Tidak Langsung	Rata-rata pertumbuhan	
	Nominal	%
Belanja Pegawai	28.398.401	19,39
Belanja Subsidi	(212.500)	33,97
Belanja Hibah	(1.948.523)	201,49
Belanja Bansos	(1.022.446)	150,99
Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa	3.475.000	239,6
Belanja Tidak Terduga	205.309	10,08

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tebo (data diolah)

Pertumbuhan anggaran belanja pada Kabupaten Tebo selama periode tahun 2006-2010 baik anggaran belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Bupati termasuk tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar Rp 28.398.401.000,- atau sebesar 19,39 persen. Anggaran belanja pegawai lebih dominan dalam membentuk defisit anggaran pada Kabupaten Tebo selama periode tahun 2006-2010. Sedangkan pertumbuhan belanja bantuan keuangan ke desa dan belanja tidak terduga masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar Rp 3.475.000.000,- atau 239,6 persen dan Rp 205.309.000,- atau sebesar 10,08 persen. Untuk anggaran belanja subsidi, hibah dan bansos mengalami pertumbuhan yang negatif, yaitu masing-masing mengalami

pertumbuhan sebesar Rp -212.500.000,-, Rp -1.948.523.000,-, dan Rp -1.022.446.000. Sedangkan anggaran belanja pada belanja bunga dan belanja bagi hasil ke desa tidak ada. Dengan demikian ada tiga komponen anggaran belanja tidak langsung yang pertumbuhannya menyebabkan peningkatan defisit anggaran.

Perbandingan Defisit Anggaran dengan Realisasinya

Dalam pelaksanaannya, realisasi pendapatan dan belanja tidak selalu sama dengan anggarannya. Bisa saja terjadi pelampauan target pendapatan atau penghematan belanja. Defisit anggaran pada saat APBD disusun tidak selalu sama besar nilainya dengan realisasinya. Berbagai kebijakan fiskal yang diambil selama tahun berjalan selama tahun berjalan bisa mempengaruhi sisi pendapatan dan belanja sehingga menyebabkan terjadinya perubahan defisit anggaran. pada umumnya setelah direalisasikan defisit anggaran berubah menjadi surplus yang dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Mengacu pada struktur Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai Laporan Realisasi Anggaran, perkembangan defisit anggaran pada saat APBD disusun dan direalisasikan bisa dilihat dalam tabel 7 berikut:

Tabel 7. Perbandingan Defisit Anggaran dan Realisasi Kabupaten Tebo Tahun 2006-2010 (Rp 000.000,-)

Tahun	Target Defisit	Realisasi	Selisih	%
2006	(45.231)	20.817	66.049	(146,02)
2007	(50.669)	(69.079)	(18.411)	36,33
2008	(80.672)	(51.991)	28.682	(35,55)
2009	(26.598)	(17.355)	9.243	(34,75)
2010	(9.245)	(6.569)	2.656	(28,79)
Rata-rata	(42.483)	(24.835)	17.644	(41,53)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tebo (data diolah)

Secara umum pada saat disusun APBD dalam kondisi defisit, namun setelah

direalisasikan ada yang mengalami surplus. Selama lima tahun terakhir setelah realisasi defisit anggaran pada Kabupaten Tebo mengalami surplus pada tahun 2006, sedangkan pada tahun 2007-2010 mengalami defisit anggaran, yang disebabkan karena realisasi pendapatan lebih kecil bila dibandingkan dengan realisasi belanja.

Dalam lima tahun terakhir terlihat penyimpangan (selisih antara realisasi dengan target defisit anggaran) defisit anggaran setelah direalisasikan dibandingkan dengan saat APBD disusun rata-rata -41,53 persen. Penyimpangan defisit tertinggi terjadi ada tahun 2006 yaitu sebesar -146.02 persen, dan penyimpangan defisit terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar -28,79 persen. Tingginya penyimpangan defisit anggaran bisa disebabkan karena kurang cermatnya penetapan angka defisit anggaran dan bisa juga disebabkan karena adanya kebijakan fiskal luar biasa yang telah diambil oleh pemerintah daerah sehingga defisit anggaran dapat ditekan.

Perbandingan penyimpangan defisit anggaran dengan SILPA tahun berkenaan dalam laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tebo Periode tahun 2006-2010 bisa dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Penyimpangan Defisit Anggaran dengan SILPA Kabupaten Tebo, 2006-2010 (Rp 000)

Tahun	Penyimpangan Defisit Anggaran	SILPA Tahun Berkenaan	Selisih
2006	66.048.603	66.055.489	(6.886)
2007	(18.410.522)	14.650	(18.425.172)
2008	28.681.615	26.589.211	2.083.404
2009	9.242.889	9.224.610	18.279
2010	2.676.094	2.656.094	20.000
Rata-rata	17.643.736	20.908.011	(3.262.075)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tebo (data diolah)

Dari tabel 8 terlihat bahwa penyimpangan defisit anggaran telah memberikan kontribusi terhadap timbulnya SILPA tahun berkenaan. Pada tahun 2006 terjadi penyimpangan defisit anggaran

dengan SILPA tahun berjalan dikarenakan terdapat pelampauan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pemerintah daerah dan pembiayaan pokok hutang. Sementara itu untuk tahun 2007-2010 terjadi pelampauan pengeluaran pembiayaan atau terdapat rencana penerimaan pembiayaan yang tidak terealisasi.

Determinan Defisit Anggaran

Untuk melihat pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal terhadap defisit anggaran selama periode tahun 2004-2011 untuk defisit anggaran menggunakan variabel dummy karena pada tahun 2004, 2005 dan 2011 tidak mengalami defisit anggaran. Untuk melihat pengaruh tersebut digunakan alat uji regresi berganda yang hasilnya sebagai berikut:

$$Y = - 0,156588 - 4,52 X_1 + 5,01 X_2 + 8,17 X_3$$

(-3,062) (4,214) (4,337)

Dari hasil pengujian diperoleh adjusted R squared sebesar 0,826. Hal ini berarti 82,6 persen variasi defisit anggaran dapat dijelaskan dari ke tiga variabel independen yakni belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa. Sedangkan sisanya sebesar 17,4 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Dari uji F-test didapatkan nilai F-hitung sebesar 12,13082 dengan probabilitas sebesar 0,017.

Untuk koefisien determinasi (R^2), dipergunakan untuk melihat berapa besar variabel dependen mampu mempengaruhi variasi besar kecilnya perubahan defisit anggaran. Berdasarkan hasil pengujian di atas maka diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,9009. Hal ini berarti 90,09 persen variasi besar kecilnya defisit anggaran dipengaruhi oleh variabel belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa. Sementara sisanya 9,01 persen lainnya dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model persamaan ini. Hasil perhitungan yang didapat adalah F-Hitung

= 12.130, sedangkan F-Tabel = 6.59 ($\alpha = 0,05$; 3, 4), sehingga F-Hitung >F-Tabel. Perbandingan antara F-Hitung dengan F-Tabel yang menunjukkan bahwa F-Hitung >F-Tabel, menandakan bahwa variabel independen secara bersama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga bahwa belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa selama periode 2004-2011 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap terjadinya defisit anggaran di Kabupaten Tebo.

Berdasarkan hasil pengujian model persamaan regresi di atas tergambar nilai t hitung dari ke tiga variabel independen. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung untuk variabel belanja pegawai adalah sebesar -3,062, nilai t hitung belanja modal sebesar 4,214 dan nilai t hitung pada belanja barang dan jasa sebesar 4,337. Dengan tingkat keyakinan 95 persen $df = n - k$ diperoleh t tabel sebesar 2,132. Dengan demikian nilai t hitung pada variabel belanja modal dan variabel belanja barang dan jasa lebih besar daripada nilai t tabel. Hal ini berarti variabel belanja modal dan variabel belanja barang dan jasa tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap defisit anggaran pada Kabupaten Tebo selama periode tahun 2004-2011. Sedangkan nilai t hitung pada variabel belanja pegawai lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai t tabel. Hal ini berarti variabel belanja pegawai tidak berpengaruh secara signifikan terhadap defisit anggaran pada Kabupaten Tebo selama periode tahun 2004-2011.

Penafsiran model persamaan regresi berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh persamaan mengenai pengaruh variabel belanja pegawai (x_1), belanja modal (x_2) dan belanja barang dan jasa (x_3) terhadap defisit anggaran Kabupaten Tebo. Berdasarkan hasil model persamaan tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut: berdasarkan hasil persamaan regresi $Y = - 0,156588 - 4,52 X_1 + 5,01 X_2 + 8,17 X_3$ dapat diterjemahkan sebagai berikut: setiap

terjadi kenaikan defisit anggaran sebesar 1 miliar maka akan menyebabkan pengurangan belanja pegawai di Kabupaten Tebo sebesar 4,52 miliar. Setiap terjadi peningkatan alokasi anggaran belanja modal sebesar 1 miliar maka defisit anggaran akan mengalami peningkatan sebesar 5,01 miliar. Setiap terjadi peningkatan alokasi belanja barang dan jasa sebesar 1 miliar maka defisit anggaran akan mengalami peningkatan sebesar 8,17 miliar. Pengaruh terbesar terhadap defisit anggaran berasal dari alokasi anggaran belanja barang dan jasa.

Hubungan Defisit Anggaran Terhadap Perkembangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi merupakan salah satu cara untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Perkembangan ekonomi yang baik salah satunya ditandai dengan adanya peningkatan pada pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto daerah tersebut.

Defisit anggaran pada suatu daerah bisa disebabkan karena adanya kebijakan dari pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan, dimana diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Apabila dana yang dimiliki oleh daerah tidak mencukupi maka daerah akan mengalami defisit anggaran.

Untuk melihat hubungan defisit anggaran dengan perkembangan ekonomi pada Kabupaten Tebo selama periode 2006-2010 dipergunakan alat uji korelasi sederhana Pearson (*Product Moment Coefficient of Correlation*). Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar -0,07986. Nilai koefisien korelasi ini jauh dari angka yang sempurna, yaitu satu.

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi Pearson tersebut digunakan alat uji t. Setelah dilakukan pengujian diperoleh t hitung sebesar -0,1387. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 persen

$df = n - k$ ($\alpha = 0,05$; 3) diperoleh t tabel sebesar 2,353. Dengan demikian t hitung < t tabel, hal ini berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara defisit anggaran dengan perkembangan ekonomi pada Kabupaten Tebo selama periode tahun 2006-2010.

Hubungan Defisit Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah, dapat dilihat dengan menghitung tingkat kemandirian daerah (Derajat Desentralisasi Fiskal) daerah tersebut. Untuk melihat hubungan defisit anggaran dengan kinerja keuangan daerah pada Kabupaten Tebo selama periode tahun 2006-2010 dipergunakan alat uji korelasi sederhana Pearson (*Product Moment Coefficient of Correlation*). Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar -0,04703. Nilai koefisien korelasi tersebut jauh dari angka yang sempurna, yaitu 1.

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi Pearson tersebut digunakan alat uji t . Setelah dilakukan pengujian diperoleh t hitung sebesar -0,0815. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 persen $df = n - k$ ($\alpha = 0,05$; 3) diperoleh t tabel sebesar 2,353. Dengan demikian t hitung < t tabel, hal ini berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara defisit anggaran dengan kinerja keuangan pada Kabupaten Tebo selama periode tahun 2006-2010.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat diidentifikasi penyebab dominan terciptanya defisit anggaran. Secara statistik pengaruh terbesar dari terciptanya defisit anggaran berasal dari besarnya belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dengan koefisien regresi sebesar 8,17 untuk anggaran belanja barang dan jasa dan sebesar 5,01 untuk anggaran belanja modal. Implikasinya, upaya untuk mengendalikan

defisit anggaran harus difokuskan pada pengurangan anggaran belanja daerah khususnya pada belanja barang dan jasa dan belanja modal. Adapun upaya yang bisa dilakukan dalam mengendalikan defisit anggaran adalah sebagai berikut:

1. Anggaran belanja barang dan jasa merupakan faktor utama penyebab terjadinya defisit anggaran pada Kabupaten Tebo selama periode tahun 2004-2011. Anggaran belanja barang dan jasa memiliki hubungan yang positif dengan defisit anggaran. Apabila anggaran belanja barang dan jasa meningkat maka defisit anggaran juga akan mengalami peningkatan. Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah dan tingginya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah mengharuskan pemerintah melaksanakan belanja barang dan jasa secara efisien dan efektif. Melalui proses belanja barang dan jasa pemerintah daerah dituntut untuk menghindari pemborosan sekaligus mampu memelihara dan meningkatkan kondisi perekonomian daerah. Proses belanja barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah bukan hanya merupakan kegiatan rutin dalam memenuhi kebutuhan instansi, tetapi merupakan suatu kegiatan strategis dalam upaya memberi pelayanan kepada masyarakat. adanya sistem penilaian kinerja kantor yang sering mendasarkan penilaian pada percepatan penyerapan dana anggaran. Akibatnya pelaksanaan anggaran lebih mengutamakan jumlah realisasi ketimbang pemilihan jenis barang/jasa yang sesuai kebutuhan. Pembelian barang dan jasa dilakukan dengan tujuan agar dana yang ada dapat segera dicairkan, tanpa mempertimbangkan apakah barang dan jasa yang dibeli bermanfaat dalam menunjang kinerja instansi. Akibatnya jumlah barang dan jasa yang tidak begitu penting bisa jadi berlebihan sementara barang lainnya

- yang sangat dibutuhkan tidak tersedia dengan cukup.
2. Anggaran belanja modal merupakan faktor kedua yang menjadi penyebab terjadinya defisit anggaran pada Kabupaten Tebo selama periode tahun 2004-2011. Anggaran belanja modal memiliki hubungan yang positif dengan defisit anggaran. Jika terjadi peningkatan pada anggaran belanja modal maka defisit anggaran juga akan mengalami peningkatan. Anggaran belanja modal dilakukan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah mengharuskan pemerintah daerah melaksanakan belanja modal secara efektif dan efisien.
 3. Anggaran Belanja pegawai pada Kabupaten Tebo selama periode tahun 2004-2011 bukan merupakan faktor utama penyebab defisit anggaran, karena anggaran belanja pegawai memiliki hubungan yang negatif dengan defisit anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka sesuai hasil penghitungan dan pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. 90,09 persen variasi besar kecilnya defisit anggaran dipengaruhi oleh variabel belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa. Sementara sisanya 9,01 persen lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. $F\text{-Hitung} > F\text{-Tabel}$, menandakan bahwa variabel independen secara bersama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga bahwa belanja pegawai, belanja

modal dan belanja barang dan jasa selama periode 2004-2011 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap terjadinya defisit anggaran di Kabupaten Tebo. Dengan demikian faktor utama penyebab defisit anggaran pada Kabupaten Tebo selama periode tahun 2004-2011 adalah belanja barang dan jasa. Faktor penyebab yang ke dua defisit anggaran adalah belanja modal.

2. Hasil analisis mengenai hubungan defisit anggaran dengan perkembangan ekonomi pada Kabupaten Tebo selama tahun 2006-2010 menunjukkan, bahwa defisit anggaran dengan perkembangan ekonomi dengan menggunakan alat uji korelasi sederhana Pearson memiliki hubungan sebesar $-0,07986$. Setelah dilakukan pengujian diperoleh t hitung sebesar $-0,1387$. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 persen $df = n - k$ ($\alpha = 0,05$; 3) diperoleh t tabel sebesar $2,353$. Dengan demikian t hitung $< t$ tabel, hal ini berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara defisit anggaran dengan perkembangan ekonomi pada Kabupaten Tebo selama periode tahun 2006-2010.
3. Hasil analisis mengenai hubungan defisit anggaran dengan kinerja keuangan daerah pada Kabupaten Tebo selama tahun 2006-2010 menunjukkan, bahwa defisit anggaran dengan kinerja keuangan dengan menggunakan alat uji korelasi sederhana Pearson memiliki hubungan sebesar $-0,04703$. Setelah dilakukan pengujian diperoleh t hitung sebesar $-0,0815$. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 persen $df = n - k$ ($\alpha = 0,05$; 3) diperoleh t tabel sebesar $2,353$. Dengan demikian t hitung $< t$ tabel, hal ini berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara defisit anggaran

dengan kinerja keuangan pada Kabupaten Tebo selama periode tahun 2006-2010.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran dan rekomendasi berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

1. Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah dan tingginya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah mengharuskan pemerintah melaksanakan belanja barang dan jasa secara efisien dan efektif. Melalui proses belanja barang dan jasa pemerintah daerah dituntut untuk menghindari pemborosan sekaligus mampu memelihara dan meningkatkan kondisi perekonomian daerah.
2. Perlunya pemerintah mencari terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah dikarenakan pertumbuhan anggaran belanja menunjukkan kecenderungan lebih tinggi dari pertumbuhan anggaran pendapatan. Karena adanya defisit anggaran akan mempengaruhi terlaksananya kegiatan peningkatan ekonomi penunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Karena anggaran belanja modal yang dilakukan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat membutuhkan dana yang besar.
3. Untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah Pemerintah Daerah perlu mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis serta sosialisasi secara intensif kepada para pengelola keuangan daerah agar mereka bisa lebih hati-hati dalam melakukan penyusunan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah, Deddi Supriadi dan Solihin, Dadang. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Gramedia. Jakarta.
- Bhendriyadi.2101.bhendriyadi.blogspot.com/2011/04/pajakfiskaldaerah.html/m=1
- Depdagri. 1997. Kepmendagri No. 690.900.327.1996. *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Depdagri. 2004. Undang-undang No. 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah*.
- Depdagri. 2004. Undang-undang No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Depdagri. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- DPPKAD Kabupaten Tebo. 2006-2011. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Tebo.
- Halim, A. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Bunga Rampai. Yogyakarta.
- Mandica, R. 2000. *Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi*. Analisis CSIS, Jakarta, Tahun XXIX, No. 1, 54-56.
- Mardismo. 2000. *Prospek Desentralisasi Sistem dan Desentralisasi Fiskal*. Makalah, FE-UGM, Yogyakarta.
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Terjemahan oleh Masri Maris, UI-Press, Jakarta.
- Rachmat, Muhammad. 2012. *Analisis Defisit Anggaran Serta*

- Hubungannya Dengan Kebijakan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten Bungo.* Tesis Program Magister Ekonomika Pembangunan. Universitas Jambi, Jambi
- Sawitri, H. Hendrin. 2006. *Dampak Defisit Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.* Universitas Terbuka. [Lppm.ut.ac.id/htmlpublikasi/01-hendrin.pdf](http://lppm.ut.ac.id/htmlpublikasi/01-hendrin.pdf)
- Simanjuntak, Dr. Robert. 2001. *Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization: One Day Conference.* LPEM-UI. Jakarta.
- Sukirno, Sadono.1998. *Pengantar Teori Makro Ekonomi.* Grafika. Jakarta.
- Wibowo, Zico. 2010. *Analisis Dampak Anggaran Terhadap Penurunan Investasi Swasta (Crowding Out) dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.* Tesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://etd.eprints.ums.ac.id/12555/>